

# Jurnal iSiP

Jurnal Masalah-Masalah Sosial dan Politik

Vol.5/No.3/Sept 2003 - Nov 2003

ISSN 1411 - 4828

**KARTUN POLITIK SEBAGAI SENI EMANSIPATORIS**

---

**KETERWAKILAN MASYARAKAT DESA DALAM PARLEMEN LOKAL**  
Suatu Penelitian Terhadap Penggunaan Hak-Hak Badan Perwakilan Desa

---

**RETORIKA DI SEPUTAR KASUS KEKERASAN  
TERHADAP WARTAWAN**  
Penerapan Pendekatan Retorika Kontemporer dari Foucault  
dan Weaver untuk Mencermati Komentar-Komentar  
Seputar Kasus Kekerasan terhadap Wartawan

---

**KAMPANYE SOSIAL PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NAPZA  
BERBASIS PARTISIPASI MASYARAKAT**

---

**BERMIMPI MENJADI INDONESIA YANG MERDEKA**

---

**RESENSI BUKU:**

**MISTIK KEJAWEN: MEMBANGUN HARMONI SOSIAL  
DENGAN MITOS DAN AJARAN**

---



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

*linik  
FISIP - UAJY*

# Jurnal iSiP

Jurnal Masalah-Masalah Sosial dan Politik

Vol.5/No.3/Sept 2003 - Nov 2003

ISSN 1411 - 4828

**KARTUN POLITIK SEBAGAI SENI EMANSIPATORIS**

---

**KETERWAKILAN MASYARAKAT DESA DALAM PARLEMEN LOKAL**  
Suatu Penelitian Terhadap Penggunaan Hak-Hak Badan Perwakilan Desa

---

**RETORIKA DI SEPUTAR KASUS KEKERASAN  
TERHADAP WARTAWAN**  
Penerapan Pendekatan Retorika Kontemporer dari Foucault  
dan Weaver untuk Mencermati Komentar-Komentar  
Seputar Kasus Kekerasan terhadap Wartawan

---

**KAMPANYE SOSIAL PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NAPZA  
BERBASIS PARTISIPASI MASYARAKAT**

---

**BERMIMPI MENJADI INDONESIA YANG MERDEKA**

---

**RESENSI BUKU:**

**MISTIK KEJAWEN: MEMBANGUN HARMONI SOSIAL  
DENGAN MITOS DAN AJARAN**

---



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
**Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

## **PENGELOLA REDAKSI**

### **Pelindung**

Dekan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

### **Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab**

Josep J. Darmawan

### **Sekretariat Redaksi**

Ike Devi Sulistyaningtyas

### **Dewan Redaksi**

J. Soedjati Djiwandono

J. Nasikun

Ign. Agus Putranto

Y. Kunharibowo

Lukas Suryanto Ispandriarno

### **Alamat Redaksi**

Jurnal iSiP

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Atma Jaya Yogyakarta  
Jl. Moses Gatot Kaca 28 Mrican Baru  
Yogyakarta 55281

Phone (0274) 561031, 514319

Fax (0274) 565258

E-mail : [fisip@mail.uajy.ac.id](mailto:fisip@mail.uajy.ac.id).

### **Catatan**

Jurnal ISIP menerima sumbangan naskah dengan syarat berikut :

1. Tema sosial dan politik
2. Diketik dalam kertas HVS A4, 15-20 halaman, spasi ganda;
3. Sistematika penulisan meliputi 3 bagian yakni Pendahuluan, Pembahasan dan Penutup dengan menyertakan Daftar Pustaka;
4. Abstrak, paling banyak 1 paragraf dalam bahasa Inggris;
5. Naskah tercetak/*print out* diserahkan bersama dengan naskah yang direkam dalam *floppy disk* dalam format rtf (*rich text format*).

Untuk kepentingan surat menyurat, mohon dapat dilampirkan *curriculum vitae* penulis yang berisi: nama, alamat rumah dan kantor, dan latar belakang pendidikan.

## RETORIKA DI SEPUTAR KASUS KEKERASAN TERHADAP WARTAWAN

### Penerapan Pendekatan Retorika Kontemporer dari Foucault dan Weaver untuk Mencermati Komentar-Komentar Seputar Kasus Kekerasan terhadap Wartawan

MC Ninik Sri Rejeki

#### Abstract

*Rhetoric is characterized by the uniquely human ability to use symbols to communicate with one another. In the time of Corax rhetoric was characterized primarily by public speaking. Today, rhetoric has its focus not only in public speaking, but also in interpersonal or organizational communication. The shift of the interest in rhetoric began at the twentieth century, and this era has become known as the contemporary period. There are some perspectives to approach rhetoric at this era. Two of them are promoted by Foucault and Weaver. The rhetoric ideas of Foucault are implicit in virtually of his works. He offered a primary concept in rhetoric that is called as episteme/discursive formation. He also suggested a method to investigate the episteme/discursive formation. The method is called as archaeology/genealogy. While Weaver offered concepts that call metaphysical dream and tyrannizing image in his perspective. All of the perspectives that are presented at this article are used to approach rhetoric's phenomena in cases of journalist's violence in Indonesia.*

*Keywords: episteme/discursive formation, archaeology/genealogy, metaphysical dream, tyrannizing image*

#### A. Pendahuluan

Meski belum hilang di dalam ingatan kita peristiwa kekerasan terhadap wartawan 8 tahun lalu yang mengakibatkan tewasnya Udin, seorang wartawan media lokal di Yogyakarta, kita kembali dikejutkan dengan peristiwa kekerasan yang menimpa Ersu Siregar, seorang reporter senior RCTI di penghujung tahun 2003. Ia meninggal akibat kekerasan yang dialaminya. Sementara masih terhitung awal tahun 2003, dunia jurnalistik juga berduka dengan peristiwa kekerasan yang menimpa beberapa wartawan Tempo berkenaan dengan pemberitaan majalah itu tentang Tanah Abang. Meski tidak diakhiri dengan sebuah kematian, namun tak urung peristiwa ini makin menambah deretan kasus-kasus kekerasan yang menimpa para jurnalis kita.

Pada setiap peristiwa-peristiwa tersebut terjadi selalu diikuti oleh munculnya

retorika yang berupa komentar-komentar, baik dari pihak yang dinilai atau diduga paling bertanggungjawab atas peristiwa itu, maupun dari sisi para jurnalis, komunitas pers, kaum aktivis, dan masyarakat umum. Retorika sebagai sarana mengkonstruksi pengetahuan atau kebenaran menjadi penting dalam konteks ini. Sebagai sebuah alat bahasa yang mampu mempertunjukkan pengetahuan atau kebenaran, retorika kemudian menjadi tak bebas nilai. Retorika dapat digunakan untuk menciptakan kesadaran palsu untuk tujuan-tujuan pembodohan, yang kalau meminjam istilah Weaver, retorika dapat digunakan untuk tujuan-tujuan jahat, namun demikian retorikapun dapat digunakan untuk mendorong orang-orang ke arah kebajikan, ke arah praksis yang sifatnya luhur yang bermuatan kebenaran sejati.

Dalam tulisan ini akan digunakan pendekatan kontemporer yang diambil dari perspektif Michel Foucault dan Richard M. Weaver atas retorika. Perspektif Foucault diambil untuk melihat pengetahuan (terpendam) yang tertanam melalui proses retorika, di mana pengetahuan tak dapat dipisahkan dari kekuasaan. Kekuasaan memproduksi dan sekaligus dipengaruhi oleh pengetahuan dan wacana. Bertolak dari perspektif ini kemudian dapat dijelaskan adanya praktek-praktek retorika yang potensial menanamkan kesadaran palsu. Dalam kerangka inilah Foucault memberikan kontribusi dalam hal konsepsinya tentang epistem/formasi diskursif (bentuk wacana) dalam retorika, serta metodenya dalam mengungkap aturan-aturan yang membentuk wacana itu. Meskipun retorika sendiri tidak memusatkan perhatian pada operasi relasi kekuasaan dalam suatu bentuk wacana, namun batang tubuhnya dapat digunakan untuk mengaplikasikan relasi kekuasaan dan bentuk wacana tersebut. Sementara itu untuk melihat intensi penggunaan retorika akan digunakan pendekatan Weaver. Pendekatan Weaver berlandas pada pandangan bahwa manusia terdiri dari *body*, *mind*, dan *soul/spirit*. Dalam diri Weaver sendiri dikenal adanya kesatuan antara ide dan praksis luhur di bidang retorika. Menurut Weaver, retorika dapat menjadi alat yang dapat menggerakkan masyarakat menuju kondisi ideal, yakni suatu kondisi yang penuh kebajikan dan kebenaran.

## B. Pembahasan

### *Perspektif Kontemporer atas Retorika*

Dalam bukunya yang berjudul *Contemporary Perspectives on Rhetoric*, Sonja K. Foss, Karen A. Foss, dan Robert Trapp (1985), mengemukakan bahwa secara esensial antara retorika pada masa Corax dan retorika kontemporer saat ini tidak ada perbedaan. Hanya saja dalam hal fokus perhatiannya telah terjadi pergeseran. Fokus retorika pada masa Corax adalah *public speaking*, sementara pada masa kini retorika juga memiliki fokus perhatian pada komunikasi antar pribadi dan komunikasi organisasional. Namun demikian secara tradisi, retorika tetap dicirikan oleh kemampuan manusia yang dengan keunikannya menggunakan simbol-simbol untuk berkomunikasi satu sama

lain. Pengertian ini dengan demikian dapat mencakup semua bentuk retorika dan konteksnya. Merekapun mengemukakan bahwa perbedaan yang sesungguhnya terjadi antara retorika terdahulu dan kontemporer adalah dalam hal perspektif yang digunakan untuk mendekati berbagai fenomena retorika. Ungkapan ini seolah-olah menggarisbawahi bahwa yang penting adalah perhatian pada perubahan perspektif yang digunakan oleh seseorang atau sekelompok orang, ketimbang perubahan subjek retorika itu sendiri. Perspektif adalah seperangkat lensa konseptual yang digunakan seseorang untuk memandang suatu fenomena (Foss, Foss, dan Trapp, 1985:14). Perspektif juga memiliki pengertian sebagai sudut pandang yang digunakan seseorang atau sekelompok orang untuk mengamati, mempersepsikan, dan menginterpretasikan suatu fenomena.

Perspektif kontemporer atas retorika antara lain dikemukakan oleh I.A. Richards, Richard Weaver, Stephen Toulmin, Chaim Perelman, Ernesto Grassi, Kenneth Burke, Michel Foucault, dan Jurgen Habermas. Para tokoh tersebut memandang retorika tidak sekedar suatu seni berbicara pada publik, namun ada fokus-fokus lain yang menjadi pusat perhatiannya, dimana masing-masing tokoh tersebut memiliki fokus perhatian yang dapat dikatakan tidak sama, meskipun ada beberapa tokoh yang memiliki kemiripan fokus. Sebagai contoh Richards dan Burke sama-sama berfokus pada kajian bahasa. Sementara Weaver dan Perelman berangkat dari nilai-nilai untuk mengkaji retorika, sedangkan Toulmin, Grassi, Foucault dan Habermas secara epistemologis memberi tawaran tentang bagaimana kita memperoleh pemahaman tentang retorika dengan sebuah konsep pengetahuan sebagai landasan pokoknya.

Dengan bertolak dari pengertian telah terjadi pergeseran titik pandang, maka kemudian dapat dikemukakan bahwa dalam perspektif kontemporer telah terjadi revitalisasi retorika yang dilakukan oleh tokoh-tokoh tersebut, yakni dari sekedar seni menyampaikan pesan atau berbicara pada publik menjadi seni yang meliputi aturan-aturan menemukan, mengorganisasikan, dan mengemukakan pesan. Dalam kerangka ini dapat dikemukakan pula bahwa perspektif kontemporer telah mengambil pijakan keilmuan

dari berbagai disiplin, seperti psikologi dan sosiologi. Tidak hanya itu, di antara para tokoh retorika kontemporer tersebut juga ada yang mengambil paradigma kritis sebagai sumber perspektif.

### **Perspektif Retorika Foucault**

Foucault, sebagaimana dikemukakan oleh Foss, dkk. (1985:189), sesungguhnya tak banyak memberikan kontribusinya di bidang retorika. Ia lebih banyak memberikan perhatian pada subjek-subjek sejarah kelembagaan dan sejarah pemikiran. Namun demikian ada beberapa konsep dasar dari Foucault yang dapat digunakan sebagai pendekatan atas retorika. Konsep dasar itu adalah (1) epistem atau bentuk wacana, (2) *governing rules* atau aturan-aturan yang menentukan isi dan bentuk wacana, (3) arkhaelogi atau genealogi yang dikenal pula sebagai metode untuk menginvestigasi tubuh wacana, dan (4) kekuasaan. Dalam uraian berikut akan dipaparkan konsep-konsep tersebut. Sumber utama paparan adalah Foss, dkk. (1985), kecuali sumber yang disebut secara khusus.

Konsep dasar Foucault dalam retorika adalah epistem. Epistem merupakan sejumlah perangkat relasi pada satu periode yang mempersatukan praktek wacana, sehingga dapat meningkatkan gambaran epistemologis, ilmu pengetahuan, dan memungkinkan terformalisasinya sistem. Epistem dapat dipahami pula sebagai kode budaya yang menentukan bahasa, skema persepsi, pertukaran, teknik, nilai-nilai, dan jenjang praksis dari budaya tersebut. Suatu epistem bisa merupakan sistem karakteristik, struktur, atau jaringan yang mendefinisikan kondisi pengetahuan atau *the world view of an age*, yaitu semacam *period style* bagi organisasi pengetahuan yang memiliki fungsi secara otomatis dalam suatu budaya. Hanya ada satu epistem yang dapat disajikan pada saat apapun. Hal ini karena struktur yang mengatur epistem sedemikian mendasar dalam usia sebuah epistem. Adapun keunikan dari setiap epistem adalah bahwa tak ada hubungan yang signifikan yang ada di antara epistem yang berbeda (Foss, dkk., 1985:194). Epistem-epistem tersebut tidak dibangun atau diciptakan dalam kerangka sebagai respons satu sama lain. Dengan demikian diskontinuitas ada di antara

epistem-epistem.

Dengan publikasinya yang disebut **The Archaeological of Knowledge**, Foucault mengganti istilah epistem menjadi bentuk wacana. Hal ini didasari alasan bahwa Foucault telah menyatakan diri sebagai seorang non strukturalis. Oleh karena itu ia menghindari metode, konsep, ataupun istilah kunci yang biasa digunakan dalam gerakan strukturalis. Suatu hal yang penting adalah bahwa penggantian istilah epistem menjadi bentuk wacana memperjelas peranan sentral Foucault dalam memandang wacana di dalam struktur pengetahuan. Adapun kerangka kerja bagi pengetahuan adalah praktek wacana. Dalam praktek wacana, *speech act* (tindak ujaran) tidak diartikan dalam pengertian keseharian, namun akan diberi pengertian, berdasar aturan-aturan yang dipahami sebagai suatu kebenaran dalam sebuah budaya.. Sebagai contoh tindak ujaran "akan hujan" akan menjadi wacana bila diucapkan oleh seorang meteorolog, dan dianggap benar dalam sebuah budaya meteorologis (Foss, dkk., 1985: 195).

Praktek wacana merupakan proses produksi dan reproduksi wacana yang berupa pertalian rumit di antara tanda-tanda dan praksis yang kemudian mengatur eksistensi dan reproduksi sosial. Apabila dikaitkan dengan kekuasaan, maka sebagai sebuah pendekatan, praktek wacana akan sangat peka terhadap peranan yang dimainkan oleh kekuasaan yang terkandung di dalamnya. Bahasa dan wacana akan selalu terlibat dalam relasi kekuasaan, terutama dalam proses pembentukan subjek dan berbagai tindakan representasi di dalam masyarakat. Melalui wacana, relasi kekuasaan dibangun dan didistribusikan ke dalam tubuh masyarakat.

Dengan demikian ciri khas pendekatan praktek wacana adalah kepekaan dan keterbukaan pendekatan ini terhadap munculnya kaitan-kaitan yang tidak transparan dalam wacana sosial maupun politik. Tidak hanya itu, pendekatan ini juga sangat kritis terhadap pemahaman sejarah yang linier dan tertutup. Sebagai pendekatan, praktek wacana juga memiliki potensi emansipatoris bagi kaum tertindas. Selain itu pendekatan ini juga dapat dipakai untuk memahami *submerged knowledge*

(pengetahuan terpendam). Temuan akan pengetahuan terpendam akan memunculkan praksis tandingan yang dapat digunakan sebagai upaya advokasi atau pengetahuan (Hikam, 1999). Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa kekuasaan selalu pula akan mengandaikan sebuah perlawanan (*resistance*).

Dalam Foucault ditemukan pula pemahaman akan *governing rules*. *Governing rules* merupakan aturan-aturan yang menentukan isi dan bentuk wacana. Produksi wacana dikontrol, diseleksi, diorganisasi, dan didistribusi sesuai dengan prosedur-prosedur tertentu. Bentuk wacana mengasumsikan karakternya menurut aturan-aturan yang telah mengatur bentuk wacana itu. Aturan-aturan itu adalah (1) aturan yang mengontrol fakta tentang sesuatu boleh dibicarakan atau tidak, (2) aturan tentang fungsi badan institusional yang menciptakan objek wacana, (3) aturan yang berfokus pada siapa yang diperbolehkan bicara dan menulis, (4) aturan tentang kualifikasi individu yang mengatakan sesuatu, (5) aturan tentang kriteria kompetensi dan pengetahuan, (6) aturan yang mendefinisikan *gesture*, perilaku, dan lingkungan yang mengikuti komunikator dalam melakukan pembicaraan, (7) aturan tentang bentuk di mana konsep-konsep dan teori-teori mesti diasumsikan diterima sebagai pengetahuan dalam wacana, (8) aturan yang menentukan validitas istilah, dan (9) aturan yang mengatur proses-proses generasi pengetahuan di mana aturan-aturan itu memperbolehkan individu-individu tertentu masuk ke dalam formulasi konsep-konsep dan teori-teori.

Dalam pada itu berkenaan dengan hakikat manusia sebagai produk wacana dapat dikemukakan bahwa manusia pada hakikatnya merupakan elemen yang mempersatukan dan menjadi pusat organisasi pengetahuan. Manusia merupakan landasan dan asal pengetahuan. Hakikat manusia itu akan hilang segera setelah pengetahuan menemukan bentuk baru, yakni berupa bentuk wacana. Bukti hilangnya hakikat manusia tersebut adalah dengan tidak lagi difokuskannya analisis bahasa pada pengetahuan dan subjek bahasa, tetapi berfokus pada praktek wacana, struktur linguistik, dan struktur epistemologis.

Metode untuk menginvestigasi bentuk

wacana tersebut adalah arkhaeologi. Istilah ini pertamakali ditemukan dalam publikasi Foucault yang berjudul **Madness and Civilization**. Tujuan metode ini adalah memasuki bagian dalam wacana untuk menemukan *governing rules* dan untuk mendeskripsikan berbagai relasi yang ada di antara pernyataan-pernyataan dalam bentuk wacana. Karakteristik metode ini adalah, pertama, menngungkap regularitas praktek wacana. Kedua, mendasarkan diri pada kontradiksi sebagai hukum eksistensi. Ketiga, mencakup deskripsi perbandingan antara praktek wacana dengan unsur-unsur di sekitarnya, dan yang keempat adalah melihat perubahan sebagai sebuah kronologi yang menceritakan peristiwa-peristiwa suksesif. Istilah arkhaeologi ini kemudian digantikan dengan genealogi pada tahun 1972 oleh Foucault, disertai alasan bahwa penggantian istilah tersebut adalah meningkatkan kesadaran baru bagi Foucault akan pentingnya relasi kekuasaan dalam metodologi investigasinya. Hal ini karena genealogi mencari *governing rules* dari praktek wacana di sepanjang jaringan relasi kekuasaan yang salah satu bagiannya adalah *governing rules* itu sendiri. Selain itu metode ini juga memungkinkan melihat keberadaan relasi di antara masa kini dan masa lalu.

Dalam pengumpulan data, metode Foucault tidak bersifat diskriminatif, karena yang terpenting adalah membuat sesuatu yang tidak tampak menjadi tampak, atau membuat sesuatu yang tak disadari menjadi disadari. Sementara itu dalam analisisnya, genealogi menekankan analisis deskriptif dan transkriptif. Pernyataan ini menggarisbawahi bahwa metode analisis genealogi tidak bersifat interpretif. Meskipun demikian tidak berarti bahwa interpretif harus dihindari secara total, karena penghindaran total jelas tak memungkinkan. Dan penghindaran atas interpretasi tersebut membawa implikasi pada penolakan atas tindak retorikal dari *author*. Hal ini dikarenakan *author* dilihat oleh Foucault dapat berperan sebagai pengisi fungsi wacana. Dalam konteks ini *author* dapat memainkan peranan dengan mengisi ruang kosong di dalam bentuk wacana. Foucault pun kemudian memilih mendekati tubuh wacana dengan sesuatu yang secara aktual diucapkan, karena dengan cara ini dapat diberikan deskripsi murni atas peristiwa-

peristiwa wacana. Pada gilirannya kemudian dapat diungkap relasi di antara pernyataan-pernyataan, penempatan peristiwa, jenis konsep, dan perubahan kekuasaan yang menyertai peristiwa.

Berkenaan dengan konsep kekuasaan, maka melalui genealogi, Foucault memperlakukan pengetahuan maupun wacana sebagai bagian yang tak terpisahkan dari beroperasinya kekuasaan. Kekuasaan merupakan sesuatu yang terorganisasi, hirarkhis, dan terkoordinasi, sementara prakteknya akan menciptakan dan memunculkan objek-objek pengetahuan, serta dapat mengakumulasi batang tubuh informasi baru. Kekuasaan juga hadir di manapun, karena kekuasaan merupakan perangkat relasi.

Menurut Foucault (Foss, dkk., 1985:205), ada dua cara kekuasaan memproduksi pengetahuan, yaitu pertama, melalui penentuan jenis wacana yang akan dilihat sebagai sesuatu yang benar, atau dengan menentukan macam pengetahuan yang dipandang valid dalam masyarakat. Kedua, dengan mengurangi subjek dalam kerangka pemberian nilai pada wacana. Hal ini terkait dengan realitas bahwa kekuasaan akan memberikan status pada individu. Individu-individu yang menempati posisi lebih tinggi akan diakui klaim kebenarannya atas pengetahuan maupun wacana, sementara individu yang berada pada tataran bawah akan terabaikan dalam hal pengetahuan dan wacananya.

Kekuasaan terkait erat dengan wacana, karena kekuasaan tidak dengan sendirinya mapan, terkonsolidasi, atau diimplementasikan tanpa adanya proses produksi, akumulasi, sirkulasi, serta penggunaan wacana. Kekuasaan dioperasikan sebagai kekuatan kreatif, yaitu sesuatu yang dapat memberikan fasilitas, melakukan produksi, dan meningkatkan kualitas maupun kondisi, sehingga hasil kekuasaan akan bersifat generatif dan kreatif. Adapun tipe yang paling penting dari operasi kekuasaan adalah kekuasaan disipliner, yaitu kekuasaan yang tidak diterapkan tidak melalui represi maupun kontrol politik, namun melalui koersi yang sifatnya sinambung, halus, otomatis, tergeneralisasi, dan meluas melalui *body of society* dan *taken for granted*. Salah satu kekuatan untuk mencapai

tipe kekuasaan ini adalah norma. Wacana kekuasaan disipliner memberi fokus pada norma-norma yang diteguhkan oleh sejumlah individu dalam masyarakat.

### *Perspektif Retorika Weaver*

Sebagaimana yang ada dalam paparan tentang retorika Foucault, maka sumber utama yang digunakan untuk menuliskan perspektif retorika Weaver berikut ini adalah dari Foss, dkk. (1985). Weaver adalah seorang pakar retorika, selain mengajar dan menulis tentang retorika, Weaver juga mampu menggunakan retorika secara efektif untuk menyampaikan kebenaran. Adapun pandangan-pandangan Weaver berkenaan dengan retorika dapat dilihat dari buku-bukunya, seperti *Ideas Have Consequences*, *The Ethics of Rhetoric*, *Visions of Order: The Cultural Crisis of Our Time*, dan *Life Without Prejudice and Other Essays*. Dari pandangan-pandangan Weaver itu dapat dilihat bahwa dalam diri Weaver ada kesatuan antara ide dan praksis yang luhur di bidang retorika. Berikut ini akan dipaparkan pandangan Weaver tentang hakikat manusia, pengetahuan dan kebenaran, serta sifat budaya.

Hakikat manusia menurut Weaver terdiri dari tubuh (*body*), pikiran (*mind*), dan jiwa atau roh (*soul or spirit*). Tiga elemen tersebut bertingkat menurut keluhurannya. Tubuh bersifat fisik dan fana. Tubuh ini menjadi tempat bersemayamnya pikiran dan jiwa atau roh. Tubuh menempati tingkat yang paling rendah dan memiliki kecenderungan memerosotkan orang untuk mengejar kepentingan badaniah. Sementara itu, pikiran menempati tingkatan yang lebih tinggi dari tubuh. Sebagai elemen yang lebih tinggi tatarannya dari tubuh, pikiran memiliki empat kemampuan, yaitu kemampuan emosional atau estetik, kemampuan etikal, dan kemampuan religius, dan kemampuan rasional atau kognitif. Kemampuan emosional atau estetik bersifat kontemplatif. Kemampuan ini memungkinkan manusia untuk merasakan kenikmatan, kasakitan, dan keindahan. Kemampuan etikal merupakan kemampuan untuk menentukan urutan kebaikan dan menentukan yang benar dan salah. Kemampuan religius bersifat intuitif. Kemampuan ini memberikan gambaran tentang tujuan hidup dan hakikat diri manusia. Sementara

itu kemampuan rasional atau kognitif memungkinkan manusia mendefinisikan konsep, menyusun ide-ide, dan sebagainya. Adapun elemen yang paling tinggi kedudukannya adalah jiwa atau roh. Jiwa atau roh merupakan kekuatan yang menyatukan individu menjadi satu kesatuan intelektual, emosional, dan spiritual. Kekuatan ini disebut sebagai *the highest self*. Kekuatan ini dapat membimbing pikiran dan tubuh ke arah kebenaran atau kejahatan.

Kebenaran menurut Weaver terdapat pada *metaphysical dream*. *Metaphysical dream* merupakan pengetahuan yang berada pada tataran tertinggi dalam hirarki kognitif. Ada tiga tataran kognitif. Tataran pertama menangani ide-ide spesifik tentang benda-benda atau entitas-entitas fisik. Ide-ide ini digunakan dalam aktivitas keseharian, sementara tataran kedua terkait dengan keyakinan, yaitu kepercayaan, teori, hukum, generalisasi, atau konsep-konsep yang menyusun realitas sebagai hasil dari proses argumentasi. Tataran ketiga, yaitu *metaphysical dream* berupa naluri tentang hakikat realitas. Pada tataran ini, ide atau keyakinan diverifikasi dengan menggunakan standar nilai. Pada tataran *metaphysical dream* inilah kebenaran yang hakiki berada.

Berkenaan dengan nilai yang menjadi standar verifikasi ide dan keyakinan, maka fokus nilai itu terdapat di pusat kebudayaan. Pusat nilai itu sekaligus menjadi pusat otoritas yang sangat berkuasa dan diupayakan untuk dicapai oleh masyarakat sebagai sebuah kesempurnaan. Pancasila bisa diambil sebagai contoh konsep budaya yang menjadi pusat nilai dan pusat otoritas ini. Dalam terminologi Weaver, pusat nilai atau pusat otoritas itu disebut sebagai *tyrannizing image*. *Tyrannizing image* terbuka bagi temuan-temuan imajinatif. Istilah inipun bersifat tak terbantahkan (*uncontested*). Istilah ini diterapkan dengan konsensus yang sifatnya relative universal. Sebagai pusat nilai dan pusat otoritas, *tyrannizing image* memberikan kontribusi pada *metaphysical dream*. *Tyrannizing image* dapat memaksa orang untuk melakukan kebenaran sesuai cita-cita yang terkandung dalam *metaphysical dream*. Namun demikian karena Weaver mengakui bahwa manusia merupakan makhluk yang bebas memilih untuk berbuat kebenaran atau kejahatan. Tetapi

Weaverpun menekankan pula bahwa meski orang bebas memilih, namun motivasi untuk melakukan kebenaran akan membawa orang pada pilihan menyesuaikan diri dengan cita-cita yang ada pada *tyrannizing image*.

Dalam pada itu Weaverpun menekankan perbedaan antara retorika dan dialektika. Retorika dan dialektika sama-sama merupakan alat bahasa. Keduanya dapat digunakan untuk menunjukkan kebenaran. Dialektika dalam kerangka argumentasi dapat membantu dalam proses memahami dan untuk mencapai *metaphysical dream*, namun ia memiliki keterbatasan-keterbatasan, antara lain adalah ketidakmampuannya untuk menggerakkan orang banyak. Retorika dapat digunakan untuk mengatasi keterbatasan tersebut karena ia memiliki sifat persuasif Retorika dapat digunakan untuk menggerakkan orang-orang dalam arahan *tyrannizing image*, namun iapun dapat digunakan untuk tujuan-tujuan jahat. Apabila yang disampaikan melalui retorika adalah kebajikan, maka retorika dapat mendorong orang-orang untuk bergerak dalam arahan *tyrannizing image*. Sebaliknya kalau yang disampaikan hal-hal jahat, maka retorika dapat menggerakkan orang-orang ke arah keburukan. Dengan demikian tampak bahwa retorika adalah alat yang tak bebas nilai.

Ekspresi retorika atas nilai-nilai dikembangkan secara eksplisit dalam suatu sistem yang terdiri dari tiga elemen, yaitu sumber-sumber argumen, kategori pragmatikal, dan istilah utama. Sumber-sumber argumen merupakan sarana untuk menginterpretasikan atau untuk melihat dunia. Komunikator menggunakan argumen-argumen tertentu untuk meminta para komunikannya mengikuti suatu bentuk penalaran yang sah dan menyetujui pandangan tertentu tentang realitas yang disajikan. Sumber-sumber argumen itu adalah *pertama*, genus dan definisi. Pemakaian genus dan definisi berlandas pada asumsi adanya kelas-kelas yang pasti yang dapat diprediksi. Sesuatu yang benar bagi suatu kelas adalah benar bagi subjek-subjek yang dibicarakan. Dalam argumen yang menggunakan genus, suatu klasifikasi sudah mapan dan diterima dalam benak khalayak. Sementara pada argument yang menggunakan definisi, klasifikasi ditetapkan saat argument dikemukakan. Oleh

peristiwa wacana. Pada gilirannya kemudian dapat diungkap relasi di antara pernyataan-pernyataan, penempatan peristiwa, jenis konsep, dan perubahan kekuasaan yang menyertai peristiwa.

Berkenaan dengan konsep kekuasaan, maka melalui genealogi, Foucault memperlakukan pengetahuan maupun wacana sebagai bagian yang tak terpisahkan dari beroperasinya kekuasaan. Kekuasaan merupakan sesuatu yang terorganisasi, hirarkhis, dan terkordinasi, sementara prakteknya akan menciptakan dan memunculkan objek-objek pengetahuan, serta dapat mengakumulasi batang tubuh informasi baru. Kekuasaan juga hadir di manapun, karena kekuasaan merupakan perangkat relasi.

Menurut Foucault (Foss, dkk., 1985:205), ada dua cara kekuasaan memproduksi pengetahuan, yaitu pertama, melalui penentuan jenis wacana yang akan dilihat sebagai sesuatu yang benar, atau dengan menentukan macam pengetahuan yang dipandang valid dalam masyarakat. Kedua, dengan mengurangi subjek dalam kerangka pemberian nilai pada wacana. Hal ini terkait dengan realitas bahwa kekuasaan akan memberikan status pada individu. Individu-individu yang menempati posisi lebih tinggi akan diakui klaim kebenarannya atas pengetahuan maupun wacana, sementara individu yang berada pada tataran bawah akan terabaikan dalam hal pengetahuan dan wacananya.

Kekuasaan terkait erat dengan wacana, karena kekuasaan tidak dengan sendirinya mapan, terkonsolidasi, atau diimplementasikan tanpa adanya proses produksi, akumulasi, sirkulasi, serta penggunaan wacana. Kekuasaan dioperasikan sebagai kekuatan kreatif, yaitu sesuatu yang dapat memberikan fasilitas, melakukan produksi, dan meningkatkan kualitas maupun kondisi, sehingga hasil kekuasaan akan bersifat generatif dan kreatif. Adapun tipe yang paling penting dari operasi kekuasaan adalah kekuasaan disipliner, yaitu kekuasaan yang tidak diterapkan tidak melalui represi maupun kontrol politik, namun melalui koersi yang sifatnya sinambung, halus, otomatis, tergeneralisasi, dan meluas melalui *body of society* dan *taken for granted*. Salah satu kekuatan untuk mencapai

tipe kekuasaan ini adalah norma. Wacana kekuasaan disipliner memberi fokus pada norma-norma yang diteguhkan oleh sejumlah individu dalam masyarakat.

### *Perspektif Retorika Weaver*

Sebagaimana yang ada dalam paparan tentang retorika Foucault, maka sumber utama yang digunakan untuk menuliskan perspektif retorika Weaver berikut ini adalah dari Foss, dkk. (1985). Weaver adalah seorang pakar retorika, selain mengajar dan menulis tentang retorika, Weaver juga mampu menggunakan retorika secara efektif untuk menyampaikan kebenaran. Adapun pandangan-pandangan Weaver berkenaan dengan retorika dapat dilihat dari buku-bukunya, seperti *Ideas Have Consequences*, *The Ethics of Rhetoric*, *Visions of Order: The Cultural Crisis of Our Time*, dan *Life Without Prejudice and Other Essays*. Dari pandangan-pandangan Weaver itu dapat dilihat bahwa dalam diri Weaver ada kesatuan antara ide dan praksis yang luhur di bidang retorika. Berikut ini akan dipaparkan pandangan Weaver tentang hakikat manusia, pengetahuan dan kebenaran, serta sifat budaya.

Hakikat manusia menurut Weaver terdiri dari tubuh (*body*), pikiran (*mind*), dan jiwa atau roh (*soul or spirit*). Tiga elemen tersebut bertingkat menurut keluhurannya. Tubuh bersifat fisik dan fana. Tubuh ini menjadi tempat bersemayamnya pikiran dan jiwa atau roh. Tubuh menempati tingkat yang paling rendah dan memiliki kecenderungan memerosotkan orang untuk mengejar kepentingan badaniah. Sementara itu, pikiran menempati tingkatan yang lebih tinggi dari tubuh. Sebagai elemen yang lebih tinggi tatarannya dari tubuh, pikiran memiliki empat kemampuan, yaitu kemampuan emosional atau estetik, kemampuan etikal, dan kemampuan religius, dan kemampuan rasional atau kognitif. Kemampuan emosional atau estetik bersifat kontemplatif. Kemampuan ini memungkinkan manusia untuk merasakan kenikmatan, kasakitan, dan keindahan. Kemampuan etikal merupakan kemampuan untuk menentukan urutan kebaikan dan menentukan yang benar dan salah. Kemampuan religius bersifat intuitif. Kemampuan ini memberikan gambaran tentang tujuan hidup dan hakikat diri manusia. Sementara

itu kemampuan rasional atau kognitif memungkinkan manusia mendefinisikan konsep, menyusun ide-ide, dan sebagainya. Adapun elemen yang paling tinggi kedudukannya adalah jiwa atau roh. Jiwa atau roh merupakan kekuatan yang menyatukan individu menjadi satu kesatuan intelektual, emosional, dan spiritual. Kekuatan ini disebut sebagai *the highest self*. Kekuatan ini dapat membimbing pikiran dan tubuh ke arah kebenaran atau kejahatan.

Kebeneran menurut Weaver terdapat pada *metaphysical dream*. *Metaphysical dream* merupakan pengetahuan yang berada pada tataran tertinggi dalam hirarki kognitif. Ada tiga tataran kognitif. Tataran pertama menangani ide-ide spesifik tentang benda-benda atau entitas-entitas fisik. Ide-ide ini digunakan dalam aktivitas keseharian, sementara tataran kedua terkait dengan keyakinan, yaitu kepercayaan, teori, hukum, generalisasi, atau konsep-konsep yang menyusun realitas sebagai hasil dari proses argumentasi. Tataran ketiga, yaitu *metaphysical dream* berupa naluri tentang hakikat realitas. Pada tataran ini, ide atau keyakinan diverifikasi dengan menggunakan standar nilai. Pada tataran *metaphysical dream* inilah kebenaran yang hakiki berada.

Berkenaan dengan nilai yang menjadi standar verifikasi ide dan keyakinan, maka fokus nilai itu terdapat di pusat kebudayaan. Pusat nilai itu sekaligus menjadi pusat otoritas yang sangat berkuasa dan diupayakan untuk dicapai oleh masyarakat sebagai sebuah kesempurnaan. Pancasila bisa diambil sebagai contoh konsep budaya yang menjadi pusat nilai dan pusat otoritas ini. Dalam terminologi Weaver, pusat nilai atau pusat otoritas itu disebut sebagai *tyrannizing image*. *Tyrannizing image* terbuka bagi temuan-temuan imajinatif. Istilah inipun bersifat tak terbantahkan (*uncontested*). Istilah ini diterapkan dengan konsensus yang sifatnya relative universal. Sebagai pusat nilai dan pusat otoritas, *tyrannizing image* memberikan kontribusi pada *metaphysical dream*. *Tyrannizing image* dapat memaksa orang untuk melakukan kebenaran sesuai cita-cita yang terkandung dalam *metaphysical dream*. Namun demikian karena Weaver mengakui bahwa manusia merupakan makhluk yang bebas memilih untuk berbuat kebenaran atau kejahatan. Tetapi

Weaverpun menekankan pula bahwa meski orang bebas memilih, namun motivasi untuk melakukan kebenaran akan membawa orang pada pilihan menyesuaikan diri dengan cita-cita yang ada pada *tyrannizing image*.

Dalam pada itu Weaverpun menekankan perbedaan antara retorika dan dialektika. Retorika dan dialektika sama-sama merupakan alat bahasa. Keduanya dapat digunakan untuk menunjukkan kebenaran. Dialektika dalam kerangka argumentasi dapat membantu dalam proses memahami dan untuk mencapai *metaphysical dream*, namun ia memiliki keterbatasan-keterbatasan, antara lain adalah ketidakmampuannya untuk menggerakkan orang banyak. Retorika dapat digunakan untuk mengatasi keterbatasan tersebut karena ia memiliki sifat persuasif Retorika dapat digunakan untuk menggerakkan orang-orang dalam arahan *tyrannizing image*, namun iapun dapat digunakan untuk tujuan-tujuan jahat. Apabila yang disampaikan melalui retorika adalah kebajikan, maka retorika dapat mendorong orang-orang untuk bergerak dalam arahan *tyrannizing image*. Sebaliknya kalau yang disampaikan hal-hal jahat, maka retorika dapat menggerakkan orang-orang ke arah keburukan. Dengan demikian tampak bahwa retorika adalah alat yang tak bebas nilai.

Ekspresi retorika atas nilai-nilai dikembangkan secara eksplisit dalam suatu sistem yang terdiri dari tiga elemen, yaitu sumber-sumber argumen, kategori pragmatikal, dan istilah utama. Sumber-sumber argumen merupakan sarana untuk menginterpretasikan atau untuk melihat dunia. Komunikator menggunakan argumen-argumen tertentu untuk meminta para komunikannya mengikuti suatu bentuk penalaran yang sah dan menyetujui pandangan tertentu tentang realitas yang disajikan. Sumber-sumber argumen itu adalah pertama, genus dan definisi. Pemakaian genus dan definisi berlandas pada asumsi adanya kelas-kelas yang pasti yang dapat diprediksi. Sesuatu yang benar bagi suatu kelas adalah benar bagi subjek-subjek yang dibicarakan. Dalam argumen yang menggunakan genus, suatu klasifikasi sudah mapan dan diterima dalam benak khalayak. Sementara pada argument yang menggunakan definisi, klasifikasi ditetapkan saat argument dikemukakan. Oleh

karena itu komunikator perlu mendefinisikan karakter dari sebuah kelas kemudian menggunakannya sebagai genus. Kedua, similitude. Similitude menghubungkan suatu objek dengan sesuatu yang kita ketahui secara lebih rinci. Similitude mencakup analogi, metafora, figurasi, perbandingan, dan kontras. Ketiga, sebab akibat. Sebab akibat melibatkan interpretasi terhadap pengalaman dalam suatu suatu hubungan kausal. Sumber argumen yang berupa sebab akibat ini mengajak audiens untuk menanggapi realitas yang berupa hal-hal yang selalu berubah berdasar keadaan. Keempat, otoritas dan testimoni. Otoritas dan testimony mengandalkan kompetensi dan integritas. Baik atau buruknya argumen tergantung pada baik atau buruknya otoritas yang digunakan. Kelima, retorikal-historis. Retorikal-historis merupakan argumen gabungan yang memerlukan suatu definisi dari genus atau prinsip dan suatu referensi pada keadaan historis.

Dalam pada itu kategori-kategori gramatikal adalah kategori-kategori yang terkait dengan pilihan gramatikal. Kategori-kategori ini mencakup pola ekspresi, jenis kalimat, dan jenis kata, sedangkan istilah-istilah utama merupakan istilah-istilah yang mendapatkan penghormatan tertinggi atau istilah-istilah yang mendapatkan sanksi terbesar dalam sebuah budaya. Istilah-istilah ini digolongkan dalam istilah baik, buruk, dan karismatik. Istilah yang tergolong baik merupakan istilah yang memiliki kedudukan tertinggi dari istilah-istilah lainnya, sementara istilah buruk merupakan istilah-istilah penolakan untuk hal-hal yang dipersepsikan sebagai musuh atau kejahatan dalam suatu budaya, sedangkan istilah-istilah karismatik merupakan istilah-istilah yang mempunyai kekuatan misterius. Sumber dari istilah karismatik adalah kehendak orang banyak. Istilah-istilah utama yang digunakan komunikator merefleksikan besarnya kontribusi komunikator dalam menggerakkan orang-orang ke arah *tyrannizing image*.

#### ***Analisis atas Retorika Seputar Kasus Kekerasan terhadap Wartawan***

Dalam tulisan ini akan diambil contoh kasus kekerasan yang dialami beberapa wartawan Tempo terkait dengan pemberitaan majalah itu

yang berjudul "Ada Tomy di Tenabang". Dengan mengambil sumber Majalah Tempo Edisi 17-23 Maret 2003, dapat dideskripsikan singkat mengenai mencuatnya kasus kekerasan terhadap beberapa wartawan Tempo terkait dengan pemberitaan "Ada Tomy di Tenabang". Berita itu menyangkut seorang pengusaha bernama Tony Winata. Isi pemberitaan antara lain mensinyalir keterlibatan Tomy dalam peristiwa kebakaran yang terjadi di Tanah Abang. Keterlibatan itu terkait dengan proposal yang diajukan Tomy untuk melakukan renovasi atas pasar Tanah Abang. Berita tentang "Ada Tomy di Tenabang" dimuat Tempo pada edisi 3 Maret 2003. Setelah itu, pada tanggal 8 Maret 2003, kantor Tempo didemonstrasi oleh orang-orang Tomy. Dalam demonstrasi tersebut, seorang wartawan, Ahmad Taufik mengalami tindak kekerasan, yaitu diseret-seret oleh para demonstran. Setelah itu, wartawan-wartawan lainnya ada yang dipukul wajahnya, ditinju perutnya, dan ada yang kena lemparan kotak kayu tempat tissue hingga tulang hidungnya terluka. Belum lagi kata-kata kotor yang menghina, dan kata-kata-kata lainnya yang berbau intimidasi. Kekerasan pasca demonstrasi itu, selain terjadi di kantor majalah Tempo, juga terjadi di kantor polisi yang sedianya dimaksudkan sebagai tempat dialog antara pihak Tempo dan para demonstran. Kekerasan diketahui oleh beberapa polisi, namun mereka tak melakukan tindakan apapun untuk mengamankan keadaan.

Setelah terjadinya peristiwa kekerasan itu, kemudian muncul komentar-komentar di media cetak, media elektronik, maupun melalui ungkapan unjuk rasa yang dilakukan sejumlah elemen masyarakat, seperti para jurnalis dari AN dan mahasiswa dari perguruan tinggi. Mereka mengemukakan cara-cara premanisme yang dilakukan anak buah Tomy Winata terhadap para wartawan tersebut. Aksi mereka tidak semata-mata dimaksudkan sebagai ungkapan solidaritas terhadap jurnalis Tempo. Namun lebih dari itu mereka prihatin terhadap terancamnya supremasi kebebasan memperoleh dan menyebarkan informasi dalam kehidupan pers di Indonesia.

Komentar-komentar itu merupakan bentuk wacana yang terjadi dalam suatu periode, yakni masa peristiwa kekerasan itu terjadi. Dalam

perspektif Foucault, komentar-komentar itu telah menampakkan adanya relasi kekuasaan, yakni relasi antara kekerasan dan kekuasaan. Sebagai contoh adalah:

(1) Komentar Ketua MPR Amien Rais. Amien mengemukakan "Itu bisa dilihat betapa tidak berdayanya aparat keamanan di depan anak buah Tomy Winata" (Pemukulan terjadi di kantor polisi, sementara para aparat keamanan tak melakukan sesuatupun untuk mengamankan pihak yang mengalami kekerasan). Tempo menginterpretasikan bahwa komentar Amien merupakan penilaian tentang adanya gejala premanisme karena pemerintah berkongkalikong dalam pembagian kekuasaan dengan mafia.

(2) Komentar KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur), mantan Presiden RI, Ketua Dewan Syuro PKB. Gus Dur mengemukakan "Apa artinya aparat kalau sama preman saja takut?..."

(3) Komentar K.H. Hasyim Muzadi (Ketua Umum PBNU), "Polisi harus proaktif. Jika tidak, ini menunjukkan posisi polisi di bawah preman..."

(4) Komentar Prof. J.E. Sahetapy (pakar Hukum). Sahetapy mengemukakan "...Masyarakat mestinya bersikap tegas terhadap beberapa *godfathers* di negara ini yang seolah-olah menguasai Jakarta."

(5) Komentar Ori Rahman (Presidium KontraS). Ori Rahman mengemukakan "Sepertinya polisi tidak berdaya. Kami mempertanyakan mengapa polisi bisa diatur seperti itu..."

(6) Komentar Haryanto Taslam (Anggota DPR dari PDIP). Taslam menyampaikan "Sangat ironis. Saat Presiden Megawati Soekarnoputri menetapkan tahun 2003 sebagai tahun antikekerasan, kekerasan dibiarkan oleh aparat keamanan. Polisi seharusnya jadi alat pelindung masyarakat, tidak diskriminatif."

(7) Komentar Todung Mulya Lubis (praktisi Hukum). Todung mengemukakan "...Kasus ini menunjukkan adanya kaitan antara premanisme dan modal, juga premanisme dan birokrasi".

Di sisi lain bisa coba kita simak komentar-komentar dari pihak aparat keamanan atau pihak yang terkait dengan kekuasaan, seperti komentar dari Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Panglima TNI, dan Kepala Staf Angkatan Darat sebagai berikut. Pertama, komentar dari Kombes

Prasetyo (Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya), Prasetyo mengemukakan "Tidak ada kok, saya tanya Kapolresnya, saya tanya Kasatsersnya. Katanya pemukulan itu enggak ada. Kalau memang ada, kita sudah dapat perintah dari Kapolda untuk disidik." Kedua, komentar dari Jenderal TNI Endriartono Sutarto (Panglima TNI). Endriartono mengemukakan "TNI tidak pernah memberikan perlindungan bagi usaha yang dijalani Tomy...". Ketiga, komentar dari Jenderal TNI Ryamizard Ryacudu (kepala Staf Angkatan Darat). Ryacudu mengemukakan "TNI tidak pernah memback-up Tomy Winata ....".

Dari paparan transkriptif di atas dapat dikemukakan bahwa ada realitas kekerasan sebagai bentuk penyelesaian masalah dari orang-orang yang tidak berkenan atas pemberitaan pers terhadap dirinya. Mereka itu terdiri dari pemilik uang dan anak buahnya yang memiliki relasi dengan penguasa. Disebabkan oleh adanya relasi tersebut maka mereka menjadi sangat "percaya diri" untuk menyelesaikan masalah dengan cara mereka sendiri tanpa takut bahwa tindakan itu tergolong tindak pidana yang bisa diproses secara hukum. Rasa percaya diri mereka antara lain tampak dari pernyataan salah satu anak buah Tomy Winata sebagai berikut "Udahlah, polisi sudah *gua* bayar semua, lampu di sini juga *gua* yang *beliin*, *gua* juga *ngeluarin duit* buat wartawan Rp 150 juta tiap bulan. Ada daftarnya. Sutiyoso juga *gue* yang *jadiin* sebagai gubernur. Udahlah, lu *ngga* ada *ape-ape*nya, jangan macam-macam." (Tempo, Edisi 17-23 Maret 2003).

Pengetahuan akan hal itu dapat dikonstruksi dari pernyataan Kepala Staf Angkatan Darat yang mengemukakan bahwa TNI tidak pernah memback-up Tomy Winata. Pernyataan yang kita baca sebagai *counter* ini justru mengungkapkan *submerged knowledge* yang mensinyalir realitas adanya *back-up* dari TNI yang membuat anak buah Tomy Winata begitu percaya diri melakukan tindak kekerasan (premanisme). Dalam Tempo edisi 17-23 Maret 2003 dikemukakan bahwa Tomy bukan merupakan sosok biasa karena penguasaannya atas jaringan bisnis yang luas. Dengan jaringan itu, ia mempunyai akses yang besar di kalangan sipil maupun militer.

### C. Penutup

Temuan-temuan tersebut, yaitu temuan-temuan yang mendekonstruksi pengetahuan yang diproduksi pihak-pihak yang terkait dengan kekuasaan (Pihak TNI memproduksi pengetahuan tidak ada *back-up* terhadap Tomy dalam perselisihan antara Tomy dan Tempo, didekonstruksi dengan pengetahuan baru yang berupa ada dukungan terhadap Tomy sehingga mereka demikian percaya diri melakukan tindak kekerasan) telah memunculkan praksis tanding sebagai landasan tindak emansipatoris, yang berupa advokasi dan penguatan, sekaligus membangun kesadaran sejati di kalangan masyarakat Praksis tanding itu dapat dicermati dari ungkapan-ungkapan unjuk rasa yang dilakukan oleh elemen masyarakat sebagai bentuk solidaritas terhadap para wartawan yang mengalami perlakuan premanisme. Ungkapan-ungkapan itu antara lain tampak sebagai berikut: "Stop kekerasan pada jurnalis", "Jangan menindas demokrasi", "Apa polisi harus diganti Pramuka?", "Polri musuh kebebasan pers", "Lawan penindas kebebasan pers".

Sementara itu, apabila ditinjau dari perspektif Weaver, retorika yang disampaikan oleh para aktivis dari berbagai komunitas, seperti AJI dan perguruan tinggi tersebut dapat mempromosikan nilai-nilai yang merefleksikan preferensi atas hal-hal yang baik. Visi dasar mereka bermuatan kebenaran. Untuk membongkar, membela, sekaligus melawan kezaliman penguasa. Pesan-pesan yang disampaikan dapat mendorong orang-orang untuk melakukan kebenaran, yaitu untuk mengakhiri gaya premanisme dalam menyelesaikan masalah yang terkait dengan pers. Para aktivis itu memiliki *metaphysical dream*. Gagasan yang mereka miliki ada dalam tataran kemampuan kognitif yang paling tinggi. Gagasan mereka adalah berhentinya kekerasan terhadap para jurnalis. Hal ini dapat dicermati dari ungkapan "Stop kekerasan pada jurnalis". Gagasan dalam tataran *metaphysical dream* tersebut diverifikasi dengan menggunakan standar nilai yang ada pada budaya jurnalistik. Adapun fokus nilai yang ada dalam budaya jurnalistik adalah kebebasan mencari dan menyebarkan informasi. Kebebasan tersebut merupakan *tyrannizing image*. Sebagai *tyran-*

*nizing image*, kebebasan mencari dan menyebarkan informasi ini dikejar dan dilihat sebagai sebuah kesempurnaan oleh masyarakat. Sebagai sebuah istilah, kebebasan mencari dan menyebarkan informasi merupakan bagian dari istilah-istilah yang tak terbantahkan (*uncontested terms*), seperti kebebasan pers, penegakan demokrasi, tolak premanisme terhadap jurnalis, dan sebagainya. Ungkapan-ungkapan tersebut kemudian dapat memberi kontribusi pada *metaphysical dream* mereka. Pemahaman itu pula yang mampu memaksa kita untuk menyesuaikan diri dan menolak hal-hal yang tidak sesuai dengan upaya menghentikan premanisme terhadap wartawan.

Di sisi lain, masih dengan pendekatan Weaver, bila dipahami manusia pada hakikatnya terdiri dari tubuh, pikiran, dan jiwa atau roh, dan bahwa tubuh dapat memerosotkan manusia ke dalam tindak mengejar kepuasan inderawi, maka dapat dikemukakan bahwa premanisme yang dilakukan anak buah Tomy Winata merupakan contoh dari tindak manusia dalam tataran tubuh. Tindakan itu mencerminkan tindakan yang disemangati oleh nafsu mengejar kepuasan inderawi. Tindakan yang menempati tataran paling rendah dalam hakikat mereka sebagai manusia. Para pelaku kekerasan dan bos mereka tak menggunakan komponen pikiran ketika jurnalis berupaya menyampaikan realitas yang terjadi Tenabang. Mereka menempuh jalan pintas dengan menggunakan cara premanisme. Kalau mereka menempuh jalan *on the track*, mestinya mereka mempergunakan hak jawab. Hak jawab dapat dipergunakan sesuai dengan aturan yang tertuang dalam undang-undang pers apabila seseorang atau sekelompok orang berkeberatan atas sebuah pemberitaan. Melalui komponen pikiran yang berkedudukan lebih tinggi dari tubuh, mereka bisa melakukan kontemplasi guna memutuskan cara yang terbaik untuk mencari kebenaran. Oleh karena itu dapat dikemukakan jika tataran yang kedua dalam hakikat mereka sebagai manusia saja tak tersentuh, maka tataran tertinggi dari kemanusiaan mereka tentunya tak tersentuh pula. Tindakan mereka tak disemangati oleh roh yang membawa pada sebuah kebenaran. Kebenaran dalam sebuah budaya yang meyakini bahwa adanya kebebasan dalam

mencari dan menyebarkan informasi merupakan hal yang baik yang membawa kebajikan bagi seluruh anggota masyarakat pemilik budaya.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Foss, Sonja K., Karen A. Foss, and Robert Trapp. 1985. **Contemporary Perspectives on Rhetoric**. Waveland Press, Inc. Illinois.

Hikam, A.S. 1999. **Bahasa dan Politik: Penghampiran Discursive Practice**. Makalah Pelatihan Analisis Wacana Pusat Penelitian Kebudayaan dan Perubahan Sosial UGM. Yogyakarta.